

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi, 514 kota/kabupaten, 7.201 kecamatan dan 83.436 desa/kelurahan yang masing-masing didalamnya memiliki pemerintah daerah sendiri (Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“Sistem Keuangan Desa,” 2018).

Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi, kewenangan, dan memperkuat kedudukan desa serta masyarakat desa sebagai subjek pembangunan maka diperlukan suatu kebijakan dan peraturan mengenai desa. Oleh sebab itu, terbentuklah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan PP No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaannya dan PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa. Dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan harapan baru untuk pembangunan desa yang lebih optimal.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini

sesuai dengan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, diantaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa (*Buku Pintar Dana Desa*, 2017).

Berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan Nawa Cita ketiga Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam NKRI, pemerintah memberikan wewenang kepada desa untuk mengelola seluruh keuangan desa yang bersumber dari pendapatan desa, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri atas usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain.
2. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer ke daerah/desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
5. Bantuan khusus dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
6. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Selain pengelolaan keuangan desa, salah satu dari hak Otonomi Desa adalah mengelola kekayaan desa. Kekayaan desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli dan dibeli atau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) atau berasal dari pendapatan lain-lain yang sah. Kekayaan asli desa terdiri dari: tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, hutan adat, dan lain-lain kekayaan milik desa yang sah.

Pengelolaan kekayaan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Kekayaan desa dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan desa.

Selain pengelolaan kekayaan desa, aparat pemerintah desa juga harus melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana transfer Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ke daerah/desa. Pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan anggaran transfer untuk dana desa sebesar 20,8 Triliun, lalu pada tahun 2016 dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah mengalami kenaikan dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu senilai 47 Triliun. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 alokasi dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah mengalami kenaikan sebesar 60 Triliun atau 7,83% dari total anggaran

transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2018 (“APBN 2018, Pemerintah Alokasikan Dana Desa Rp. 60 Triliun,” 2018).

Kepala Bapermades, Utomo menyatakan bahwa dana desa untuk Kabupaten Karanganyar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 138 Miliar telah cair, rincian dana tersebut adalah alokasi dana desa sebesar Rp. 103 Miliar serta bantuan keuangan yang berasal dari retribusi daerah sebesar Rp. 21,266 Miliar. Dengan anggaran sebesar itu, maka setiap desa di Kabupaten Karanganyar mendapatkan dana rata – rata sebesar Rp. 851 Juta. (“Dana Desa Karanganyar Cair Rp 138 M.,” 2018).

Peran pemerintah desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melakukan seluruh kegiatan yang telah tertuang dalam peraturan perundangan. Dana transfer harus dikelola dengan tahapan yang sesuai Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut, dalam Bab V Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDesa berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk sepakati

bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
4. Pelaporan pelaksanaan APBDesa di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi.

Peran desa sebagai pihak pengelola keuangan harus melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Mendagri No. 20 Tahun 2018. Dalam penerimaan tanggung jawab ini, pemerintah desa harus siap dan mampu mengelola keuangan desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Desa Gempolan merupakan desa yang memiliki kekayaan desa yaitu berupa tanah desa, sawah, dan bangunan desa yang dapat meningkatkan pendapatan desa. Kekayaan desa ini seluruhnya harus diserahkan pada kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa, maka dengan adanya kekayaan desa yang menghasilkan pendapatan asli desa dan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi diperlukan adanya pengelolaan keuangan desa untuk di pertanggungjawabkan kepada pemerintah kota/kabupaten dan Provinsi.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, sehingga dapat menjadi pedoman penyusunan pengelolaan keuangan dan aset desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS KESIAPAN APARATUR DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENYONGSONG PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus di
Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)”.**

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan desa di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar menyongsong Permendagri No. 20 tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian adalah,

1. Untuk mendiskripsikan pengelolaan keuangan desa di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar
2. Untuk mendiskripsikan kesiapan aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar menyongsong Permendagri No. 20 tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih konkrit bagi pemerintah,

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar selaku pengelola keuangan desa, selain itu sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan pemerintah desa.

3. Kegunaan Akademis

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
- c. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam usulan penelitian tentang kesiapan aparatur desa dan pengelolaan keuangan desa menyongsong Peraturan Mendagri No. 20 Tahun 2018 ini akan dibagi dalam lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari uraian tentang teori-teori yang secara ringkas menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti, kerangka konseptual, dan penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari penjelasan semua unsur metode dalam penelitian yaitu, jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrument penelitian, teknik pengelolaan dan analisis data, dan pengujian keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi gambaran umum Desa Gempolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar, hasil analisis data dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukn, serta berisi saran-saran yang perlu disampaikan baik teruntuk obyek penelitian maupun bagi peneliti yang selanjutnya.